ADIBA: JOURNAL OF EDUCATION
Vol. 6 No. 1 (2026), page 1-14
https://wikep.net/index.php/ADIBA
e-ISSN: 2808-4721

PENDIDIKAN ISLAM DI ARAB SAUDI DAN RELEVANSINYA BAGI PENGEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Rendi Fiteriadi *
Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
rendifiteriadi@gmail.com

Romi
Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
bujangromi@gmail.com

Abstract

The diverse characteristics of students in elementary schools require curriculum management that accommodates their varying learning needs. This study aims to analyze how the organization and implementation of curriculum management contribute to supporting differentiated learning to improve the quality of learning in elementary schools. The study employed a qualitative approach with a library research design, reviewing and synthesizing twenty nationally indexed scientific journal articles discussing curriculum management and differentiated learning in elementary schools in Indonesia. Data were analyzed using content analysis techniques with stages of reduction, theme categorization, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the four functions of curriculum management—planning, organizing, implementing, and evaluating—serve as structural prerequisites for the success of differentiation of content, process, product, and learning environment in the classroom. However, most of the reviewed literature focuses on the implementation stage in the classroom and provides relatively little discussion of resource organization and systematic curriculum evaluation. This situation indicates a gap between school-level curriculum policies and classroom differentiation practices. This study contributes by offering an integrative conceptual framework that links the function of curriculum management with the dimensions of differentiated learning, while also recommending strengthening the role of school principals in organizing and evaluating the curriculum as a strengthening factor for the quality of learning in elementary schools.

Keyword: *Curriculum management; differentiated learning; learning quality; elementary school; independent curriculum*

Abstrak

Pendidikan Islam di Arab Saudi banyak dibicarakan saat membahas perubahan pendidikan Islam di dunia Muslim, tetapi masih sedikit penelitian yang mengaitkannya langsung dengan keadaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat ciri-ciri dan arah perubahan pendidikan Islam di Arab Saudi, membandingkannya dengan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia, dan menentukan elemen yang bisa diterapkan atau tidak. Penelitian ini menggunakan cara kualitatif dengan mengkaji 15 sumber ilmiah yang meliputi artikel jurnal, bab dalam buku, buku, laporan kebijakan, dan dokumen kebijakan. Data yang didapat dianalisis dengan cara tematik dan perbandingan berdasarkan konteks yang berkaitan dengan peminjaman kebijakan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan tiga poin penting. Pertama, pendidikan Islam di Saudi didorong oleh pemerintah dengan otoritas agama sebagai pelaku utama, sehingga perubahan kurikulumnya bersifat top-down dan sangat terhubung dengan Visi 2030. Kedua, arah perubahannya, yang mencakup moderasi dalam beragama, pembaruan materi ajar, dan peningkatan peran guru, sejalan dengan agenda moderasi beragama dan Kurikulum Merdeka di Indonesia. Ketiga, struktur pengelolaan yang terpusat dan hubungan antara negara dan ulama sulit diterapkan di Indonesia karena masyarakatnya yang beragam dan dibagi antara dua kementerian. Kajian tematik juga menunjukkan bahwa lebih banyak referensi yang membahas kebijakan dan kurikulum daripada

peran guru dan sejarah kelembagaan. Artikel ini memberikan kerangka untuk memilih dan mengadaptasi yang bisa dijadikan panduan bagi pengembang kebijakan PAI.
Kata Kunci: Pendidikan Islam; Arab Saudi; Pembelajaran Agama Islam; kesederhanaan dalam beragama; adopsi kebijakan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pendidikan Islam berada di titik pertemuan antara menjaga tradisi dan tuntutan zaman modern (Sartika & Fransiska, 2024); (Sarmila dkk., 2023); (Saputra dkk., 2024); (Sanggenafa & Aslan, 2025); (Sampe & Aslan, 2025). Ketegangan ini terlihat di banyak negara yang berpenduduk Muslim, dan sering kali pembaruan dalam pendidikan Islam dianggap sebagai usaha untuk mengombinasikan nilai-nilai agama dengan kebutuhan untuk menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi. Arab Saudi memiliki posisi unik dalam situasi ini. Sebagai negara yang memiliki dua kota suci, Arab Saudi sejak lama menjadi acuan bagi umat Islam, termasuk di Indonesia. Sementara itu, sistem pendidikannya telah melalui perubahan yang cukup rumit sejak diterapkannya Visi 2030, yang menekankan pentingnya reformasi pendidikan sebagai cara untuk memperluas ekonomi dan sekaligus mengedepankan pemahaman agama yang lebih moderat.

Indonesia mengalami banyak masalah yang berbeda tetapi saling terkait. Pendidikan Agama Islam diajarkan sebagai pelajaran yang harus diambil di sekolah, mencakup Al-Qur'an dan Hadis, pemahaman tentang akidah dan akhlak, hukum Islam, serta sejarah umat Islam (Olivia et al., 2024). Konsep moderasi dalam beragama telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional untuk tahun 2020 hingga 2024, sehingga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah (Kementerian Agama RI, 2019; Olivia et al., 2024). Dalam hal kurikulum, Kurikulum Merdeka memberikan kesempatan untuk pembelajaran yang lebih fleksibel dan sesuai dengan konteks, namun untuk menanamkan nilai moderasi, diperlukan kerangka pikir yang sebanding dan sesuai (Noviani & Yanuarti, 2023). Peran guru Pendidikan Agama Islam sangat penting karena mereka harus memahami moderasi dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Olivia et al., 2024).

Dalam pembicaraan publik di Indonesia, nama Arab Saudi sering kali dijadikan contoh, baik sebagai model yang diikuti maupun sebagai patokan yang tidak disukai. Kedua pandangan ini umumnya muncul tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi di Saudi dan apa yang dapat berpengaruh pada sistem pendidikan agama Islam di Indonesia. Memahami hal ini sangat penting karena pengalaman yang ada di Saudi berkaitan dengan masalah yang juga dihadapi oleh pendidikan agama Islam, yaitu bagaimana menyusun kurikulum agama yang seimbang tanpa kehilangan identitas keislamannya, serta bagaimana menyiapkan pengajar yang dapat mengajarkannya di kelas.

1.2 Kesenjangan penelitian

Tinjauan awal terhadap literatur menunjukkan empat kekurangan. Pertama, penelitian mengenai pendidikan Islam di Arab Saudi biasanya hanya melihat aspek dalam negeri, seperti aturan, materi ajar, dan hubungan kekuasaan, atau hanya berfokus pada pengajaran bahasa Inggris, tanpa mempertimbangkan pengaruhnya terhadap pendidikan agama di negara lain. Kedua, studi PAI di Indonesia mengenai moderasi dan Kurikulum Merdeka hanya melihat ke

dalam diri sendiri. Ketiga, penelitian yang membandingkan negara-negara di Timur Tengah mengelompokkan Arab Saudi bersama dengan Mesir dan Turki tanpa mempertimbangkan relevansinya untuk Indonesia. Keempat, hubungan antara Saudi dan Indonesia umumnya dilihat melalui politik luar negeri dan penyebaran ajaran, bukan melalui cara pendidikan. Oleh karena itu, belum ada analisis yang secara jelas membedakan elemen pendidikan Islam dari Saudi yang bisa diterapkan atau tidak untuk pengembangan PAI di Indonesia.

1.3 Tujuan dan kontribusi

Penelitian ini memiliki tiga tujuan: (1) mengetahui ciri-ciri dan arah perubahan dalam pendidikan Islam di Arab Saudi; (2) membandingkan dengan Pendidikan Agama Islam di Indonesia dari segi pengelolaan, kurikulum, dan guru; dan (3) menentukan relevansi serta batasan adaptasinya untuk pengembangan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Ada dua sumbangan dari artikel ini. Pertama, secara empiris, artikel ini menunjukkan dengan jelas bagaimana tulisan-tulisan yang ada menggambarkan masalah ini sehingga kita bisa melihat tema yang utama dan yang kurang diperhatikan. Kedua, secara konseptual, artikel ini menawarkan kerangka seleksi dan adaptasi yang bisa digunakan untuk mempertimbangkan pelajaran dari negara lain dengan lebih teliti.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Peminjaman kebijakan sebagai kerangka analisis

Kerangka inti dari tulisan ini adalah tentang peminjaman kebijakan pendidikan. Phillips dan Ochs menjelaskan proses ini sebagai beberapa langkah yang meliputi ketertarikan antar negara, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan penyesuaian atau pengadaptasian. Hal yang penting untuk dipahami adalah bahwa kebijakan yang berhasil di suatu tempat tidak bisa berpindah begitu saja, karena kebijakan itu terikat pada jaringan orang-orang, lembaga, dan nilai-nilai tertentu. Dalam kerangka ini, pertanyaan yang perlu dipikirkan bukanlah apakah Indonesia harus mencontoh Arab Saudi, tetapi elemen mana yang bisa dipindahkan dan apa saja syarat yang perlu dipenuhi agar proses pemindahan itu berjalan dengan baik.

Sebagai alat tambahan, penelitian tentang kurikulum di Saudi menggunakan ide tentang hubungan kekuasaan dan pengetahuan dari Foucault pada tahun 1980. Latifah dan Solihat pada tahun 2024 memanfaatkan konsep ini untuk menjelaskan cara negara mengatur materi pendidikan sehingga kurikulum menjadi tempat untuk menanamkan pemikiran tertentu. Lensa ini membantu kita memahami perubahan kurikulum di Saudi tidak hanya sebagai perbaikan teknis, tetapi juga sebagai proyek yang berkaitan dengan politik dan agama.

2.2 Pendidikan Islam di Arab Saudi: sejarah dan struktur

Menurut Elyas dan Picard (2010), sistem pendidikan di Arab Saudi sampai pertengahan abad ke-20 lebih fokus pada penguasaan Al-Qur'an dan keterampilan dasar seperti matematika. Warisan ini mempengaruhi metode pengajaran, identitas para guru, dan cara masyarakat melihat tujuan pendidikan. Marghalani (2017) memberikan gambaran tentang pendidikan Islam di negara ini, sementara Quamar (2021) mengeksplorasi perubahan dan perbaikan dalam sistem pendidikannya. Rugh (2002) dan Prokop (2003) menekankan aspek politik pendidikan, yaitu ketegangan antara kebutuhan untuk modernisasi dan kekuatan otoritas agama dalam

menentukan materi pendidikan. Kondisi keamanan dan politik yang lebih luas, termasuk dinamika sejak tahun 1979 (Hegghammer, 2010) dan sejarah politik kerajaan (Al-Rasheed, 2010), juga memberikan tekanan untuk adanya reformasi.

Elyas dan Picard (2013) menjelaskan bahwa kejadian 11 September 2001 menyebabkan perubahan besar dalam cara pandang pendidikan yang lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar, melalui pendekatan neoliberalisme. Pemahaman ini sangat penting karena menunjukkan bahwa perubahan yang datang di era Visi 2030 bukanlah awal yang baru, melainkan bagian dari perubahan yang sudah ada sebelumnya.

2.3 Reformasi pada era Visi 2030

Al-Otaibi (2020) menjelaskan cara ganda yang diambil oleh pemerintah Saudi: mereka mendorong lembaga agama untuk menggunakan penjelasan yang lebih moderat, sekaligus menambahkan materi modern seperti ilmu pengetahuan, filsafat, dan bahasa Mandarin untuk mendukung ekonomi yang didorong oleh sektor swasta. Laporan ini juga menunjukkan bahwa usaha ini cukup sukses, terutama ketika beberapa guru yang menolak perubahan dihilangkan, dan pendekatan Muhammad bin Salman berbeda dari yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya karena mencakup lembaga di luar sistem pendidikan. Latifah dan Solihat (2024), setelah menganalisis buku Dirasat Islamiyah, menemukan bahwa perubahan dalam kurikulum bertujuan untuk menanamkan ideologi yang membuat generasi muda sejalan dengan agenda Islam moderat dari pemerintah. Athanasoulia (2020) dan Sarah dan rekan-rekannya (2023) menempatkan perubahan ini dalam konteks yang lebih luas, yaitu perubahan peran Islam dalam hubungan luar negeri dan proses modernisasi di masa Muhammad bin Salman.

2.4 Moderasi beragama dan PAI di Indonesia

Di Indonesia, Kementerian Agama RI (2019) mendefinisikan moderasi beragama sebagai cara beragama yang adil dan tidak melampaui batas. Olivia dan rekan-rekannya (2024) menjelaskan hal ini melalui nilai-nilai seperti tawassuth, tawazun, tasamuh, musawah, i'tidal, dan syura yang bisa diterapkan dalam pelajaran PAI di Kurikulum Merdeka. Noviani dan Yanuarti (2023) sampai pada hasil yang sama, yaitu bahwa perancangan kurikulum PAI sangat penting untuk memperkuat moderasi. Keduanya menekankan peran guru dan budaya di sekolah sebagai faktor utama. Untuk madrasah, petunjuk pelaksanaan Kurikulum Merdeka ditetapkan secara terpisah lewat Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022.

2.5 Perbandingan penelitian terdahulu dan posisi artikel ini

Jika kita lihat, penelitian mengenai Saudi dan penelitian tentang Indonesia memiliki tema yang serupa, yaitu moderasi dan kurikulum, tetapi berbeda dalam pandangan tentang siapa yang membawa perubahan. Di literatur tentang Saudi, negara dan pemimpin agama dinilai sebagai penggerak utama, sementara di literatur Indonesia, perhatian lebih pada guru, sekolah, dan budaya belajar. Fadhluzzakiyy dan teman-teman pada tahun 2025 mencoba menghubungkan kedua pandangan ini dengan mengatakan bahwa keberhasilan reformasi dipengaruhi oleh situasi politik dan ideologi serta kesiapan orang-orangnya, namun tidak memberikan penjelasan lebih untuk Indonesia. Artikel ini hadir untuk mengisi kekurangan tersebut dengan mempertimbangkan apa yang penting bagi Pendidikan Agama Islam di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang menggunakan studi pustaka. Pemilihan desain ini karena objek yang diteliti adalah wacana, kebijakan, dan kurikulum yang ada dalam buku, bukan perilaku yang perlu dilihat secara langsung. Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan fokus pada pengembangan PAI di negara ini.

Sumber data terdiri dari 15 dokumen yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan kebijakan. Di dalamnya terdapat 11 artikel dari jurnal, satu bab dari sebuah buku, satu buku, satu laporan tentang kebijakan, dan satu dokumen kebijakan (lihat Tabel 1). Data ini dikumpulkan melalui pencarian di situs akademik, direktori jurnal yang bisa diakses secara terbuka, dan situs web penerbit, dengan menggunakan kata-kata kunci seperti pendidikan Islam di Arab Saudi, reformasi kurikulum Vision 2030, moderasi dalam beragama, dan Kurikulum Merdeka PAI. Kriteria untuk memilih data adalah (a) membahas tentang pendidikan Islam atau perubahan dalam pendidikan dan agama di Arab Saudi, juga tentang PAI dan moderasi dalam beragama di Indonesia; (b) diambil dari jurnal, penerbit yang terakreditasi, atau lembaga resmi; dan (c) memiliki informasi pengenal yang dapat dicari. Sumber yang mendasari teori dan metode, seperti Foucault (1980), Phillips dan Ochs (2003), serta Braun dan Clarke (2006), dipakai untuk membantu analisis tetapi tidak digunakan untuk proses pengkodean.

Teknik mengumpulkan data adalah cara mendokumentasikan informasi. Setiap sumber dicatat identitasnya, tipe, fokus penelitian, dan temuan pentingnya. Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, analisis tema mengikuti panduan Braun dan Clarke tahun 2006: melakukan pengkodean awal pada judul, ringkasan, dan temuan utama, mengelompokkan kode menjadi enam tema (T1 moderasi dalam beragama; T2 perkembangan kurikulum; T3 peran dan kemampuan guru; T4 kebijakan negara dan visi pembangunan; T5 kekuatan ulama dan ideologi; T6 sejarah dan tradisi lembaga), dan menghitung seberapa sering tema tersebut muncul. Kedua, melakukan perbandingan konteks antara Arab Saudi dan Indonesia dalam hal pengelolaan, kekuatan keagamaan, kurikulum, keragaman siswa, dan guru. Ketiga, menilai seberapa baik setiap elemen dapat diterapkan dengan menggunakan pendekatan pinjaman kebijakan. Keberhasilan dijamin dengan cara memeriksa berbagai jenis sumber dan mencatat proses pengkodean yang diambil.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang harus disebutkan. Pengkodean dilakukan pada bagian judul, ringkasan, dan hasil penting sehingga frekuensi tema menggambarkan kecenderungan fokus wacana, bukan seberapa dalam pembahasannya dalam teks. Penilaian tentang sejauh mana temuan ini bisa diterapkan bersifat interpretatif dan bisa diuji lagi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Gambaran Data

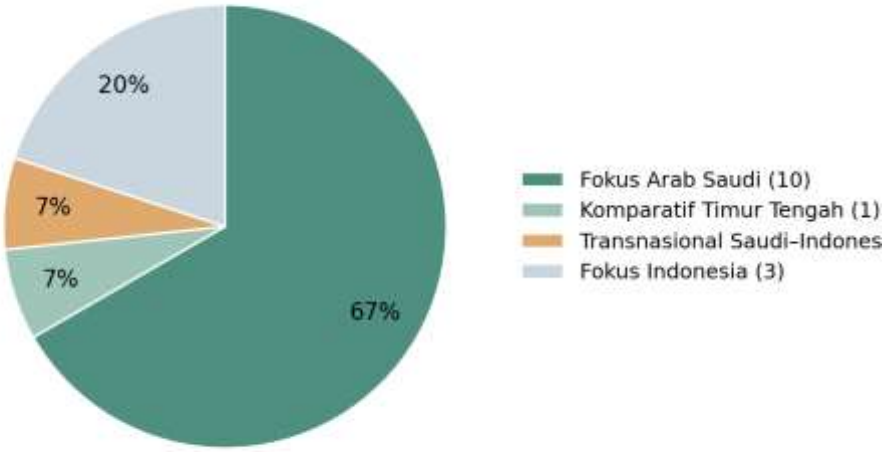
Tabel 1 menampilkan data beserta hasil pengodean tema yang diperoleh. Dari 15 sumber yang ada, 10 sumber (67%) membahas Arab Saudi, tiga sumber (20%) fokus pada Indonesia, satu sumber membandingkan Arab Saudi dengan Mesir dan Turki, serta satu sumber meninjau hubungan antara Saudi dan Indonesia (Gambar 1). Komposisi ini menunjukkan ketidakseimbangan awal: literatur yang ada lebih banyak menjelaskan tentang Saudi dari pada

membahas maknanya bagi pihak lain, dan hubungan antara kedua konteks tersebut terasa sangat dangkal.

Tabel 1. Korpus penelitian dan hasil pengodean tematik

Kode	Sumber	Jenis dan fokus	T1	T2	T3	T4	T5	T6
S1	Elyas & Picard (2010)	Artikel jurnal; sejarah pendidikan Saudi dan praktik pengajaran			✓			✓
S2	Elyas & Picard (2013)	Artikel jurnal; kebijakan pendidikan tinggi pasca-9/11				✓		
S3	Rugh (2002)	Artikel jurnal; pilihan dan kendala pendidikan Saudi				✓	✓	
S4	Prokop (2003)	Artikel jurnal; politik pendidikan Saudi		✓			✓	
S5	Marghalani (2017)	Bab buku; pendidikan Islam di Arab Saudi		✓				✓
S6	Quamar (2021)	Buku; perubahan dan reformasi sistem pendidikan Saudi		✓		✓		
S7	Al-Otaibi (2020)	Laporan kebijakan; reformasi pendidikan agama Visi 2030	✓	✓		✓	✓	
S8	Latifah & Solihat (2024)	Artikel jurnal; kurikulum Dirasat Islamiyah dan relasi kuasa	✓	✓		✓	✓	
S9	Fadhluzzakiyy et al. (2025)	Artikel jurnal; reformasi pendidikan Islam Saudi, Mesir, Turki	✓	✓	✓	✓		
S10	Sarah et al. (2023)	Artikel jurnal; modernisasi Arab Saudi era Muhammad bin Salman				✓		
S11	Athanasoulia (2020)	Artikel jurnal; Islam dalam kebijakan luar negeri Saudi pasca-2011	✓			✓	✓	
S12	Aswar (2016)	Artikel jurnal; politik luar negeri Saudi dan Salafi-Wahabi di Indonesia					✓	
S13	Olivia et al. (2024)	Artikel jurnal; moderasi beragama dalam PAI Kurikulum Merdeka	✓	✓	✓			
S14	Noviani & Yanuarti (2023)	Artikel jurnal; internalisasi moderasi dalam Kurikulum Merdeka PAI	✓	✓				
S15	Kementerian Agama RI (2019)	Dokumen kebijakan; buku moderasi beragama	✓			✓		

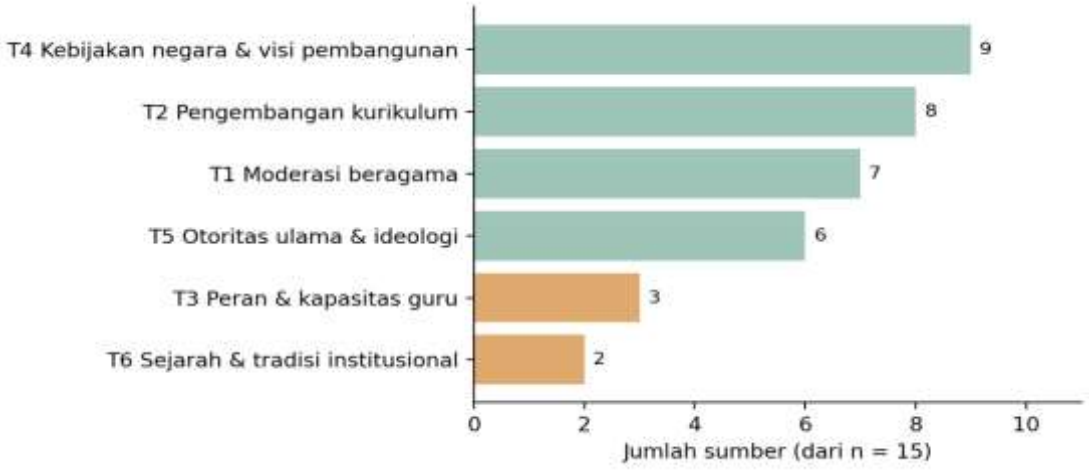
Catatan: T1 moderasi beragama; T2 pengembangan kurikulum; T3 peran dan kapasitas guru; T4 kebijakan negara dan visi pembangunan; T5 otoritas ulama dan ideologi; T6 sejarah dan tradisi institusional. Sumber: pengodean penulis.



Gambar 1. Distribusi korpus berdasarkan fokus kajian (n = 15)
Sumber: pengolahan penulis dari Tabel 1

4.2 Peta tematik: kebijakan dominan, guru terabaikan

Gambar 2 menunjukkan frekuensi kemunculan enam tema. Tema kebijakan negara dan visi pembangunan (T4) muncul dalam 9 dari 15 sumber yang dibahas, yaitu 60%.Tema pengembangan kurikulum (T2) hadir dalam 8 sumber, atau 53%.Tema moderasi beragama (T1) muncul dalam 7 sumber, sebesar 47%.Sementara itu, tema otoritas ulama dan ideologi (T5) muncul dalam 6 sumber, yaitu 40%. Justru, peran dan kemampuan guru (T3) hanya disebutkan dalam 3 sumber (20%) dan sejarah serta tradisi lembaga (T6) hanya muncul dalam 2 sumber (13%).



Gambar 2. Frekuensi kemunculan tema dalam korpus (n = 15)
Sumber: pengolahan penulis dari Tabel 1.

Pola ini punya dua implikasi. Pertama, pembahasan mengenai pendidikan Islam di Saudi Arabia lebih didominasi oleh isu kebijakan dan materi pelajaran, hal ini wajar karena reformasi

tersebut didorong oleh pemerintah. Kedua, dan lebih penting lagi bagi Indonesia, tema guru hampir tidak muncul dalam literatur dari Saudi. Dari tiga sumber yang membahas tema guru, hanya satu yang membicarakannya dalam konteks reformasi era Visi 2030 (Fadhluzzakiyy et al., 2025), sedangkan sumber lainnya membahas identitas guru dalam sejarah pengajaran (Elyas & Picard, 2010) atau menjadikannya sebagai isu utama di Indonesia (Olivia et al., 2024). Laporan kebijakan Saudi hanya membahas guru dengan menyebutkan pemindahan mereka yang menolak perubahan (Al-Otaibi, 2020). Artinya, pelajaran mengenai cara guru-guru disiapkan untuk mengajar kurikulum baru justru yang paling sedikit terdokumentasi, meskipun hal itu justru yang paling dibutuhkan oleh PAI. Temuan ini menjadi alasan nyata mengapa belajar dari Saudi tidak boleh dihentikan hanya pada teks kebijakan.

4.3 Karakteristik pendidikan Islam di Arab Saudi

Pembacaan atas data menghasilkan tiga karakteristik utama. Pertama, pendidikan Islam di Saudi Arabia berlandaskan pada negara tersebut. Reformasi dimulai dari pusat, dan Al-Otaibi (2020) mengatakan bahwa pendekatan saat ini lebih memiliki peluang berhasil dibandingkan upaya sebelumnya karena fokusnya pada institusi keagamaan di luar sistem pendidikan. Akibatnya, laju perubahan yang tinggi, tetapi tergantung pada kemampuan pihak-pihak berkebijakan agama untuk selaras. Prokop (2003) dan Rugh (2002) sejak awal sudah menunjukkan bahwa pendidikan di Saudi tidak pernah bebas dari pengaruh politik dan otoritas keagamaan.

Kedua, reformasi memiliki dua aspek: moderasi agama dan modernisasi konten berlangsung secara bersamaan (Al-Otaibi, 2020). Keduanya dianggap sebagai syarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang tidak tergantung pada penghasilan dari minyak. Dengan kata lain, moderasi di Saudi bukanlah tujuan pendidikan yang terpisah, melainkan dipertahankan dalam rangka program pembangunan. Ini berbeda dengan Indonesia, di mana moderasi lebih dalam akar pada kebutuhan menjaga kerukunan di masyarakat yang beragam (Olivia et al., 2024).

Ketiga, kurikulum berfungsi sebagai instrumen ideologis. Dengan menggunakan lensa Foucault, Latifah dan Solihat (2024) menunjukkan bahwa perubahan pada buku Dirasat Islamiyah mengenai hubungan antar-agama dan dalam agama bertujuan untuk membentuk siswa yang sesuai dengan konsep Islam moderat yang dipegang oleh pemerintah. Temuan ini mengingatkan bahwa kurikulum keagamaan selalu mencakup aspek kekuasaan, dan bahwa moderasi bisa dipahami sebagai upaya pembebasan sekaligus upaya pengendalian. Bagi Indonesia, pelajaran yang paling penting adalah tetap waspada: moderasi dalam pendidikan agama Islam perlu dibuat secara terbuka dan bisa didiskusikan, agar tidak terkesan seperti arahan ideologis yang hanya satu pihak saja.

4.4 Perbandingan dengan PAI di Indonesia

Tabel 2 merangkum perbandingan pada enam dimensi. Kesamaan yang paling terlihat adalah dalam arah, yaitu sama-sama menuju moderasi dan modernisasi isi materi pembelajaran. Perbedaan paling tajam ada pada mekanisme. Di Saudi, perubahan dilakukan melalui pengendalian pemerintah terhadap lembaga dan individu, termasuk pemecatan guru yang menolak perubahan tersebut. Di Indonesia, pendekatan yang ditunjukkan oleh literatur adalah

dengan cara membiasakan, mencontoh, serta melibatkan komunitas sekolah (Olivia et al., 2024), dalam kerangka kebhinekaan dan Pancasila.

Tabel 2. Perbandingan pendidikan Islam di Arab Saudi dan PAI di Indonesia

Dimensi	**Arab Saudi**	**Indonesia**
Tata kelola	Kebijakan relatif terpusat dan reformasi digerakkan negara (Al-Otaibi, 2020; Quamar, 2021)	Terbagi antara Kemendikbudristek dan Kementerian Agama; madrasah memiliki pedoman tersendiri (KMA No. 347 Tahun 2022)
Otoritas keagamaan	Lembaga dan ulama resmi menjadi aktor kunci yang harus selaras dengan agenda reformasi (Prokop, 2003; Al-Otaibi, 2020)	Otoritas bersifat plural: pemerintah, organisasi keagamaan masyarakat, dan pesantren
Arah moderasi	Pergeseran dari corak keagamaan dominan menuju Islam moderat yang dirancang negara (Latifah & Solihat, 2024)	Moderasi beragama sebagai agenda nasional dalam RPJMN 2020–2024 berbasis wasathiyyah dan Pancasila (Olivia et al., 2024; Kementerian Agama RI, 2019)
Kurikulum	Penambahan muatan modern (sains, filsafat, musik, bahasa Mandarin) bersamaan dengan revisi muatan keagamaan (Al-Otaibi, 2020)	Kurikulum Merdeka yang fleksibel, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan PAI sebagai mata pelajaran wajib (Olivia et al., 2024)
Keragaman peserta didik	Buku Dirasat Islamiyah direvisi pada isu relasi inter- dan intra-agama (Latifah & Solihat, 2024)	Sekolah negeri memuat peserta didik berbagai agama sehingga PAI harus hidup berdampingan dengan keragaman (Olivia et al., 2024)
Guru	Penyingkiran guru yang menolak perubahan dilaporkan sebagai bagian strategi (Al-Otaibi, 2020)	Guru PAI diharapkan menjadi teladan moderasi melalui pembiasaan dan keteladanan (Olivia et al., 2024)

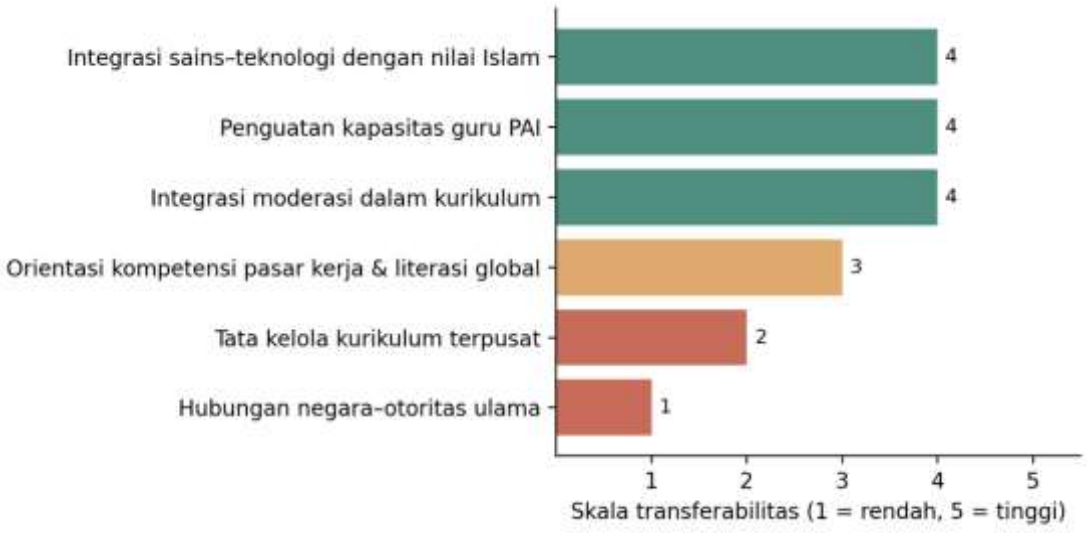
Sumber: sintesis penulis dari korpus penelitian.

Perbedaan mekanisme itu berakar pada struktur. Indonesia memiliki dua departemen yang mengurus pendidikan, yaitu Kemendikbudristek dan Kementerian Agama, sehingga kebijakan kurikulum untuk madrasah membutuhkan alat penyelarasan tersendiri (Kementerian Agama RI, 2022). Otoritas keagamaan juga ada di organisasi masyarakat dan pesantren. Oleh karena itu, menyalin pola pengendalian yang terpusat bukan hanya tidak cocok dengan tradisi keberagaman, tetapi juga secara struktur sulit dilakukan.

Ada satu temuan yang sering luput. Meski arahnya sama, kedua sistem itu memulai dari titik awal yang berbeda. Saudi Arabia sedang berubah dari pendekatan keagamaan yang dominan menjadi Islam moderat yang dibuat oleh pemerintah (Latifah & Solihat, 2024), sedangkan Indonesia awalnya sudah memiliki tradisi moderasi yang terbentuk dari kehidupan masyarakat dan kini ingin mengintegrasikannya ke dalam kurikulum pendidikan (Olivia et al., 2024). Moderasi di Indonesia justru lebih tepat diartikan sebagai upaya memperkuat dan perlembagaan, bukan mengubah arah. Perbedaan ini mencegah pembacaan yang salah bahwa Indonesia harus mengikuti jalur yang sama dengan Saudi.

4.5 Relevansi dan transferabilitas

Berdasarkan perbandingan tersebut, keenam unsur dinilai memiliki tingkat transferabilitas yang berada pada skala 1 (rendah) hingga 5 (tinggi) (Gambar 3). Penilaian ini dilakukan secara interpretatif dan didasarkan pada sejauh mana unsur tersebut sesuai dengan struktur, nilai, dan kemampuan lembaga di Indonesia.



Gambar 3. Penilaian transferabilitas unsur pendidikan Islam Saudi bagi PAI di Indonesia
Sumber: penilaian interpretatif penulis berdasarkan sintesis korpus.

Tiga unsur memperoleh skor tinggi (4). Pertama, integrasi moderasi ke dalam kurikulum. Indonesia telah memiliki dasar kebijakan dan nilai operasionalnya (Olivia et al., 2024; Kementerian Agama RI, 2019), sehingga hal yang bisa dipelajari dari Saudi adalah keterlibatan yang tegas dalam menempatkan moderasi sebagai bagian dari kurikulum yang jelas dan bisa dianalisis, terutama melalui peninjauan buku teks seperti yang dilakukan Latifah dan Solihat (2024). Kedua, penguatan kapasitas guru. Fadhluzzakiyy et al.(2025) menyatakan bahwa fleksibilitas dalam kurikulum dan pelatihan guru penting untuk menghadapi tantangan di abad ke-21, dan kesimpulan tersebut sesuai dengan hasil penelitian di Indonesia yang menunjukkan bahwa guru PAI memiliki potensi besar dalam memengaruhi perkembangan peserta didik (Olivia et al., 2024). Unsur ini dinilai bisa diterapkan karena tidak tergantung pada struktur politik tertentu. Ketiga, menggabungkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam. Penambahan materi terkini di dalam Kurikulum Saudi (Al-Otaibi, 2020) sesuai dengan upaya Indonesia menggabungkan pembelajaran agama dengan kemampuan yang diperlukan di masa depan melalui proyek yang melibatkan beberapa bidang ilmu.

Orientasi terhadap kompetensi pasar kerja dan literasi global mendapatkan skor sedang (3). Elyas dan Picard (2013) menunjukkan bahwa orientasi pasar dalam kebijakan Saudi juga mendapat kritik dari perspektif neoliberal. Indonesia bisa mengembangkan kemampuan peserta didik, tetapi harus tetap menjaga agar tujuan pendidikan Islam tidak disamakan dengan kebutuhan akan tenaga kerja. Sebaliknya, tata kelola kurikulum yang terpusat (2) dan hubungan antara negara dengan otoritas ulama (1) dianggap sulit untuk dipindahkan karena bertentangan dengan struktur dua kementerian serta keberagaman otoritas keagamaan di Indonesia.Selain itu,

penggantian guru yang menolak perubahan tidak sesuai dengan pendekatan pembinaan yang diusung oleh literatur PAI.

4.6 Model seleksi–adaptasi

Hasil di atas dapat disimpulkan dalam model seleksi-adaptasi (Gambar 4). Model ini mengubah pertanyaan dari "apa yang dilakukan Arab Saudi?" menjadi "apa yang sesuai dengan konteks Indonesia?" Mengikuti langkah-langkah Phillips dan Ochs (2003), rasa tertarik terhadap praktik di Saudi harus melewati proses pengambilan keputusan yang memperhatikan beberapa hal seperti prinsip pluralisme dan Pancasila, struktur dua kementerian, serta sistem pesantren dan madrasah. Hanya bahan yang lolos seleksi yang sampai ke tahap penerapan, dan hanya bahan yang disetujui oleh guru serta komunitas sekolah yang benar-benar diterapkan.



Gambar 4. Model seleksi–adaptasi pelajaran dari pendidikan Islam Saudi bagi PAI di Indonesia
Sumber: rumusan penulis berdasarkan Phillips dan Ochs (2003) dan hasil penelitian.

Faktor-faktor lain yang tidak boleh diabaikan juga dimasukkan ke dalam model ini. Aswar (2016) membahas hubungan antara politik internasional Saudi dan penyebaran ideologi Salafi-Wahabi di Indonesia. Lanskap rujukan keagamaan yang terhubung dengan jejaring juga dapat berubah sesuai dengan perubahan dalam kurikulum Saudi. Ini adalah hipotesis yang perlu diuji lebih lanjut, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa membaca reformasi Saudi bukan hanya aktivitas akademik, tetapi juga cara untuk mengantisipasi perubahan pada referensi yang digunakan di pendidikan Islam Indonesia.

4.7 Implikasi bagi pengembangan PAI

Tabel 3 menerjemahkan temuan ke dalam lima bentuk adaptasi beserta risikonya. Inti rekomendasinya adalah bahwa pelajaran paling berguna dari Saudi bukan pada model kendalinya, melainkan pada tiga hal: moderasi yang dijadikan agenda kurikulum yang eksplisit, penempatan guru sebagai penentu, dan keberanian menelaah isi buku teks secara kritis. Ketiganya bisa dijalankan dengan pendekatan khas Indonesia, yaitu partisipatif dan berbasis pembinaan.

Tabel 3. Pelajaran, bentuk adaptasi, dan risiko peminjaman kebijakan

Pelajaran dari Arab Saudi	Bentuk adaptasi di Indonesia	Risiko bila dipinjam tanpa seleksi
Moderasi sebagai agenda kurikulum yang eksplisit	Menyusun indikator moderasi yang terukur pada capaian pembelajaran dan asesmen PAI, berpijak pada wasathiyyah dan Pancasila	Moderasi menjadi slogan, atau berubah menjadi alat kontrol ideologis
Modernisasi konten dan kompetensi masa depan	Mengintegrasikan sains, teknologi, dan literasi digital ke dalam PAI, misalnya lewat pembelajaran berbasis proyek	Beban kurikulum berlebih dan dikotomi yang justru menguat
Guru sebagai penentu keberhasilan	Pelatihan berkelanjutan, komunitas belajar, dan pendampingan guru PAI	Resistensi guru dan kesenjangan kesiapan antarwilayah
Pelibatan institusi di luar aparatus pendidikan	Kolaborasi Kemenag, Kemendikbudristek, organisasi keagamaan, dan pesantren dalam penyusunan materi	Fragmentasi dan tumpang tindih kebijakan
Telaah isi buku teks sebagai bahan evaluasi	Analisis isi buku PAI secara berkala oleh peneliti independen	Temuan tidak ditindaklanjuti dalam revisi buku

Sumber: rumusan penulis berdasarkan hasil penelitian.

Rekomendasi pertama menuntut indikator yang jelas agar moderasi tidak berhenti sebagai slogan, tetapi juga tidak menjadi alat kontrol. Latifah dan Solihat (2024) memberi peringatan bahwa kurikulum keagamaan selalu berkaitan dengan kuasa, sehingga perumusan indikator perlu melibatkan guru, akademisi, dan organisasi keagamaan secara terbuka. Rekomendasi kedua berkaitan dengan temuan peta tematik pada subbab 4.2: karena guru adalah tema paling terabaikan, sistem PAI perlu membangun sendiri basis bukti tentang apa yang efektif menyiapkan guru, misalnya melalui penelitian tindakan dan evaluasi program pelatihan. Rekomendasi ketiga menekankan kolaborasi lintas kementerian dan organisasi keagamaan, karena pengalaman Saudi menunjukkan bahwa reformasi lebih mungkin berhasil bila menyentuh institusi di luar aparatus pendidikan (Al-Otaibi, 2020), meski Indonesia harus menempuhnya lewat kemitraan, bukan kendali.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menjawab tiga tujuan. Pertama, pendidikan Islam di Arab Saudi berporos pada negara dan otoritas keagamaan, dengan arah perubahan berupa moderasi keagamaan, modernisasi konten, dan penempatan kurikulum sebagai instrumen ideologis yang terikat pada Visi 2030. Kedua, dibandingkan dengan PAI di Indonesia, arah perubahannya sejalan dengan agenda moderasi beragama dan Kurikulum Merdeka, tetapi mekanismenya berbeda: Saudi menempuh kendali terpusat, sedangkan Indonesia mengandalkan pembiasaan, keteladanan, dan kemitraan dalam kerangka kebhinekaan. Ketiga, unsur yang relevan dan dapat diadaptasi adalah integrasi moderasi ke dalam kurikulum, penguatan kapasitas guru, dan integrasi sains dengan

nilai Islam, sedangkan tata kelola terpusat dan hubungan negara–ulama kurang dapat dipindahkan.

Temuan tambahan yang berharga adalah bahwa literatur lebih banyak membahas kebijakan dan kurikulum daripada guru dan sejarah institusional. Kerangka seleksi–adaptasi yang diajukan dapat dipakai pengembang kebijakan untuk menimbang pelajaran lintas negara secara lebih hati-hati. Penelitian ini terbatas pada 15 sumber, pengodean tingkat abstrak, dan penilaian transferabilitas yang interpretatif. Penelitian lanjutan disarankan memakai pembacaan teks penuh dan, bila memungkinkan, data primer berupa wawancara dengan guru dan pengembang kurikulum PAI untuk menguji penilaian transferabilitas yang diajukan di sini.

6. Daftar Pustaka

Al-Otaibi, N. (2020). *Vision 2030: Religious education reform in the Kingdom of Saudi Arabia* [Special report]. King Faisal Center for Research and Islamic Studies. https://kfcris.com/view/post/305

Al-Rasheed, M. (2010). *A history of Saudi Arabia* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Aswar, H. (2016). Politik luar negeri Arab Saudi dan ajaran Salafi-Wahabi di Indonesia. *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations, 1*(1). https://doi.org/10.5281/zenodo.4606669

Athanasoulia, S. (2020). From 'soft' to 'hard' to 'moderate': Islam in the dilemmas of post-2011 Saudi foreign policy. *Religions, 11*(4), 211. https://doi.org/10.3390/rel11040211

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Elyas, T., & Picard, M. (2010). Saudi Arabian educational history: Impacts on English language teaching. *Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, 3*(2), 136–145. https://doi.org/10.1108/17537981011047961

Elyas, T., & Picard, M. (2013). Critiquing of higher education policy in Saudi Arabia: Towards a new neoliberalism. *Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, 6*(1), 31–41. https://doi.org/10.1108/17537981311314709

Fadhluzzakiyy, K. A., Munir, M., & Nurlaila, N. (2025). Islamic education reform in the Middle East: Tradition and modernization in education in Saudi Arabia, Egypt, and Turkey. *Al-Fikru, 19*(11). https://doi.org/10.51672/alfikru.v19i11.674

Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977* (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.

Hegghammer, T. (2010). *Jihad in Saudi Arabia: Violence and pan-Islamism since 1979*. Cambridge University Press.

Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Kementerian Agama RI. (2022). *Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 tentang pedoman implementasi Kurikulum Merdeka pada madrasah*.

Latifah, A., & Solihat, A. (2024). Power relation and knowledge: Linking Islamic education to socio-political reform in Saudi Arabia. *ATTARBIYAH: Journal of Islamic Culture and Education, 9*(2), 157–172. https://doi.org/10.18326/attarbiyah.v9i2.157-172

Marghalani, S. A.-R. A. (2017). Islamic education in Saudi Arabia. Dalam H. Daun & R. Arjmand (Eds.), *Handbook of Islamic education* (hlm. 1–14). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-53620-0_28-1

Noviani, D., & Yanuarti, E. (2023). Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam Kurikulum Merdeka Belajar Pendidikan Agama Islam. *Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 3*(1), 57–68.

Olivia, Kustati, M., & Seprianti, N. (2024). Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 8*(2), 29432–29441.

Phillips, D., & Ochs, K. (2003). Processes of policy borrowing in education: Some explanatory and analytical devices. *Comparative Education, 39*(4), 451–461.

Prokop, M. (2003). Saudi Arabia: The politics of education. *International Affairs, 79*(1), 77–89.

Quamar, M. M. (2021). *Education system in Saudi Arabia: Of change and reforms*. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-981-15-9173-0

Rugh, W. A. (2002). Education in Saudi Arabia: Choices and constraints. *Middle East Policy, 9*(2), 40–55.

Sarah, S., Arifin, N. F., Ramona, E., & Adam, Y. F. (2023). Modernisasi Arab Saudi era Muhammad bin Salman. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 25*(2). https://doi.org/10.22373/substantia.v25i2.19688

Sampe, P. D., & Aslan, A. (2025). OPTIMISING STUDENT INTEREST AND TALENT DEVELOPMENT THROUGH INTRACURRICULAR LEARNING OPTIONS AND THEMATIC PROJECTS IN THE MERDEKA CURRICULUM. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, *5*(3), Article 3.

Sanggenafa, C. O. I., & Aslan, A. (2025). THE ROLE OF ULAMA IN CRIMINAL POLICY FORMATION IN INDONESIA. *INJOSEDU: International Journal of Social and Education*, *2*(5), Article 5.

Saputra, H., Usman, S., Sakka, A. R., & Aslan, A. (2024). The Effect Of Using Learning Media On Learning Motivation About Creed and Morals At Mas Ushuluddin Singkawang. *IJGIE (International Journal of Graduate of Islamic Education)*, *6*(1), Article 1. https://doi.org/10.37567/ijgie.v6i1.3698

Sarmila, U., Aslan, A., & Astaman, A. (2023). THE ROLE OF PARENTS TOWARDS YOUTUBE USERS IN BUILDING CHILDREN'S RELIGIOUS BEHAVIOR IN KUALA PANGKALAN KERAMAT VILLAGE. *Archipelago Journal of Southeast Asia Islamic Studies (AJSAIS)*, *1*(2), 116–122.

Sartika, E., & Fransiska, F. W. (2024). UNDERSTANDING THE STUDENTS'ENGLISH LEARNING ACHIEVEMENT AND HOME ENVIRONMENT SUPPORTS DURING SCHOOL CLOSURE TO RESPOND TO PANDEMIC AT PRIVATE MADRASAH TSANAWIYAH AT-TAKWA SAMBAS. *International Journal of Teaching and Learning*, *2*(4), 939–953.